

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Kekayaan tersebut menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada maka Indonesia menjadi negara yang maju (UTAMI, 2024). Pembangunan ialah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada dasarnya, pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Pembangunan berbasis pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat memiliki beberapa sektor, salah satunya adalah pembangunan pada sektor pariwisata baik pada tingkat lokal maupun nasional. Dalam Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Kepariwisata Pasal 30 berbunyi bahwa Pemerintah Daerah/kota diberikan wewenang dalam menyusun dan menetapkan induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota atau menetapkan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengembangkan wisata yang berada di wilayahnya. Salah satu daerah di Indonesia yang melakukan pengembangan inovasi sebagai upaya meningkatkan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat adalah Kota Makassar. Kota Makassar merupakan salah satu kota yang terus berkembang

pesat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk dan juga pembangunan tempat-tempat yang memadai seperti pusat perbelanjaan, kawasan pemukiman, dan objek wisata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024, jumlah penduduk di Kota Makassar ialah 1.477.900 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kota Makassar menurut Kecamatan.

<b>Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2024</b>		
<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Mariso	58.800
2	Mamajang	58.100
3	Tamalate	189.200
4	Rappocini	150.900
5	Makassar	82.000
6	Ujung Pandang	24.900
7	Wajo	29.400
8	Bontoala	55.200
9	Ujung Tanah	36.700
10	Kepulauan Sangkarrang	15.000
11	Tallo	148.000
12	Panakukang	144.400
13	Manggala	161.800
14	Biring Kanaya	216.700
15	Tamalanrea	106.800
<b>Jumlah</b>		<b>1.477.900</b>

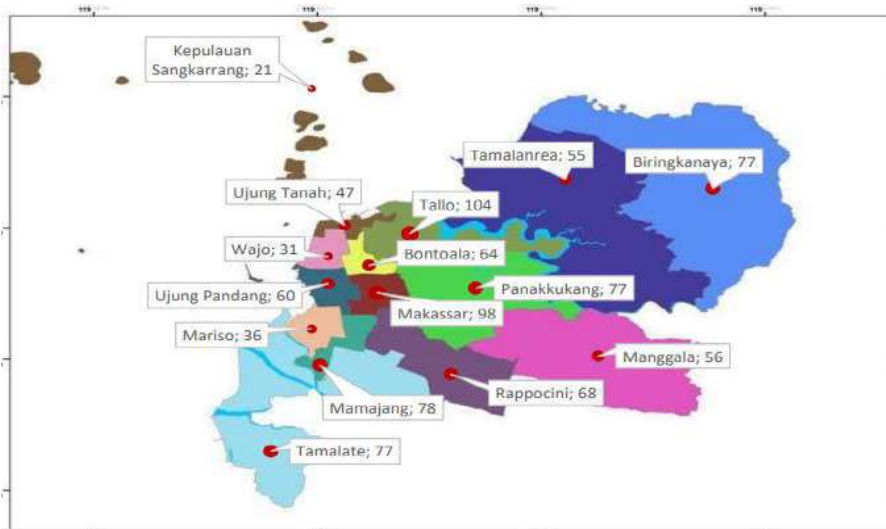
**Tabel 1 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**

Sumber : BPS, 2024

Sebagai pusat perkotaan yang terus mengalami perkembangan di wilayah Indonesia bagian Timur, Kota Makassar dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti penurunan kualitas lingkungan, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya ruang publik yang layak terutama pada kawasan lorong di Kota Makassar (Idrus & Umar, 2024). Berdasar pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 bahwa lorong adalah jalan kecil dengan lebar maksimal 4 meter yang di sebelah kiri dan kanannya terdapat rumah/bangunan/ setapak dan dapat diakses dari jalan utama serta

memiliki cahaya matahari yang cukup. Walikota Makassar telah melakukan berbagai langkah inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mewujudkan kota bersih, aman, nyaman, terampil dan sejahtera. Melihat jumlah lorong di Kota Makassar terbilang cukup besar sekitar 7.520 (Wulandari, 2024) diperlukannya program pengembangan lorong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini bertujuan mengubah lorong-lorong kumuh menjadi kawasan yang layak huni dan berdaya saing.

Salah satu strategi Walikota Makassar adalah dengan membuat Lorong Wisata (Longwis) yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan lorong yang ada. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata. Lorong Wisata (Longwis) merupakan pengembangan lebih lanjut dari inovasi sebelumnya yaitu Lorong Garden. Lorong Garden adalah inisiatif pemerintah Kota Makassar untuk menata lorong agar lebih nyaman secara ekologi dan produktif bagi masyarakat melalui kegiatan bercocok tanam. Program Lorong Wisata (Longwis) dihadirkan sebagai bentuk upaya mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dapat dilihat adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota agar masyarakat Kota Makassar dapat meningkatkan perekonomiannya. Terdapat 5.000 lorong yang akan dijadikan sasaran program Lorong Wisata (Longwis) (IDN TIMES Sulsel, 2020). Berikut ini adalah data jumlah Lorong Wisata (Longwis) yang tersebar di 15 Kecamatan Kota Makassar.



**Gambar 1 1 Sebaran Jumlah (Longwis) di Setiap Kecamatan di Kota Makassar, 2023**

Sumber : Profil Kota Makassar, 2024

JUMLAH LORONG WISATA DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2023		
No	Kecamatan	Jumlah Lorong Wisata
1.	<u>Mariso</u>	36
2.	<u>Mamajang</u>	78
3.	<u>Tamalate</u>	77
4.	<u>Rappocini</u>	68
5.	Makassar	98
6.	Ujung Pandang	60
7.	Wajo	31
8.	<u>Bontoala</u>	64
9.	Ujung Tanah	47
10.	<u>Kepulauan Sangkarrang</u>	21
11.	Tallo	104
12.	<u>Panakukang</u>	77
13.	Manggala	56
14.	<u>Biringkanaya</u>	77
15.	<u>Tamalanrea</u>	55
<b>Jumlah</b>		<b>949</b>

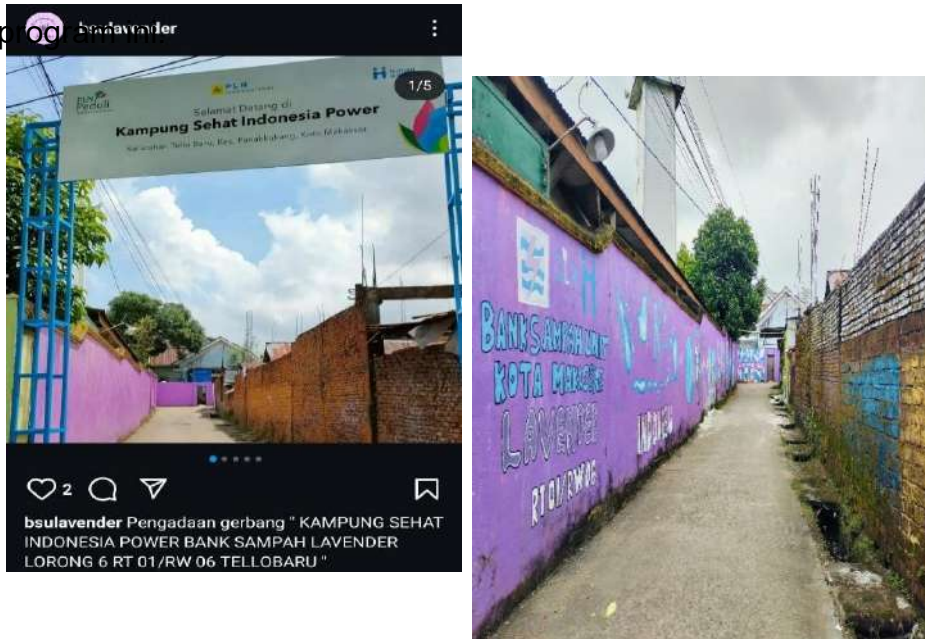
**Tabel 1 2 Jumlah Lorong Wisata (Longwis) di Setiap Kecamatan di Kota Makassar, 2023**

Sumber : Profil Kota Makassar, 2024

Program Lorong Wisata (Longwis) hadir sebagai terobosan dari pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran cukup penting. Melalui program ini, pemerintah Kota Makassar berupaya memberdayakan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Ini juga menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan lorong di Kota Makassar. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dengan mengembangkan berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat lorong. Keberadaan lorong wisata yang dikembangkan oleh pemerintah juga menyentuh dan memberikan manfaat langsung bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya, di setiap Lorong Wisata (Longwis) yang dikembangkan di masing-masing kecamatan turut memberikan pembinaan, maupun mengembangkan potensi wilayahnya. Keberhasilan program Lorong Wisata (Longwis) sangat bergantung pada sumber daya yang baik dan fasilitas yang memadai. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan, tidak hanya kualitas lingkungan yang meningkat, tetapi juga potensi ekonomi lokal dapat digali secara optimal. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, menyediakan dukungan dan sumber daya sehingga tujuan dan sasaran dari program ini dapat tercapai dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program Lorong Wisata (Longwis) di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang,

tepatnya di Jalan Dr. Leimena Lorong 6 RT 01/RW 06, yaitu Lorong Wisata (Longwis) Lavender yang menjadi bukti nyata keberhasilan



**Gambar 1 2 Lorong Wisata (Longwis) Lavender**

Sumber : IG : Lavender, 2024

Keberhasilan Lorong Wisata (Longwis) Lavender dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- (1) Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Lorong Wisata,
- (2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih,
- (3) Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik,
- (4) Pengelolaan tanaman hias dan sayuran yang berjalan secara optimal, dan
- (5) Kegiatan lorong yang inovatif. Lorong Wisata (Longwis) Lavender masih beroperasi hingga saat ini dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Keberhasilan Lorong Wisata (Longwis) Lavender ternyata berbeda yang dialami dengan Lorong Wisata (Longwis) Hajar Aswad yang berlokasi di Jalan Dr. Leimena Lorong 09 Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang yang kini membutuhkan pembenahan.



**Gambar 1 3 Berita Lorong Wisata (Longwis) RW 003 (Tello Baru)**

Sumber : ThisTime.id, 2024

Adapun indikator yang menjadi fokus pembenahan Lorong Wisata (Longwis) Hajar Aswad, meliputi :

- (1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Lorong Wisata,
- (2) Sosialisasi terkait Lorong Wisata (Longwis) yang masih belum optimal,
- (3) Sarana dan prasarana sudah tidak terawat dan juga tidak terdistribusi secara merata
- (4) Pengelolaan tanaman hias dan sayuran yang belum berjalan secara optimal, dan
- (5) Kegiatan lorong yang kurang inovatif. Berdasarkan indikator

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran Lorong Wisata (Longwis) Hajar Aswad belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan Program Lorong Wisata (Longwis) di Kota Makassar diyakini menunjukkan adanya sebuah ketimpangan. Hal ini dapat dilihat adanya sebuah Lorong Wisata (Longwis) yang hingga saat ini masih berjalan dengan baik sesuai tujuannya dan terdapat juga Lorong Wisata (Longwis) yang belum berjalan efektif dan optimal secara keseluruhan dengan adanya berbagai dinamika. Keberhasilan sebuah Lorong Wisata (Longwis) apabila terdapat dukungan dari pemerintah meliputi sumber daya, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, dan kolaborasi antar lembaga. Selain itu, dalam pelaksanaan program Lorong Wisata (Longwis) juga diperlukan struktur yang baik yang dimaksudkan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan program Lorong Wisata (Longwis) tidak hanya bergantung pada implementasi fisik, tetapi pada sejauh mana keberlanjutan program tersebut mampu mencapai tujuan-tujuan utamanya dalam berbagai aspek.

Melalui penelitian ini, penulis akan menguraikan implementasi program Lorong Wisata (Longwis) dengan menggunakan model implementasi kebijakan teori Charles O' Jones dengan indikator: (1) Organisasi, (2) Interpretasi, (3) Penerapan. Teori ini memiliki kerangka yang efektif untuk melihat bagaimana dinamika selama pelaksanaan kebijakan Lorong Wisata (Longwis) di lapangan. Penelitian dengan menggunakan teori tersebut akan penulis lakukan dengan tujuan program Lorong Wisata (Longwis) yang berdasar pada peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Lorong Wisata yaitu:

- 1) Melakukan pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis teknologi informasi, berdasarkan potensi lorong dalam penentuan Lorong Wisata yang terkait dengan potensi sumber daya manusia, potensi fisik lingkungan dan potensi pengembangan ekonomi.
- 2) Mengembangkan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis *green garden*, kuliner dan kerajinan, dan
- 3) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekonomi lorong berdasarkan potensi yang dimiliki.

Dari pelaksanaan program Lorong Wisata (Longwis) di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, maka penelitian Ilmiah ini sangat relevan untuk dilakukan. Berdasarkan berita dan observasi yang dilakukan di beberapa Lorong Wisata (Longwis) di Kota Makassar, ditemukan adanya lorong yang berhasil dalam hal pelaksanaan Lorong Wisata (Longwis) serta lorong yang membutuhkan pembenahan seperti fasilitas yang belum memadai. Hingga saat ini, masih belum ada penelitian yang mengkaji pelaksanaan Lorong Wisata (Longwis) Lavender dan Hajar Aswad di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Meskipun terdapat penelitian yang terkait dengan pelaksanaan program Lorong Wisata, hasil penelitian menunjukkan perbedaan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi ruang analisa mengenai realisasi dari Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata (Longwis) dengan melakukan wawancara kepada Pemerintah, lembaga terkait, masyarakat terhadap penyelenggaraan dan Implementasi kebijakan Lorong

Wisata (Longwis) di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

## **1.2. Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1. Konsep Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebijakan adalah (1) Kepandaian, Kemahiran, Kebijaksanaan, (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan. Sedangkan Anderson dalam (Priska Sahoming, et al., 2019) mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang untuk memecahkan suatu masalah.

Kebijakan publik berasal dari bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* artinya “kebijakan/kebijaksanaan”. Namun, belum adanya kesepakatan akan terjemahan *policy* menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, akan tetapi kata *policy* ini lebih cenderung digunakan dengan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Carl Freadrich dalam Pramono, (2020) mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok ataupun instansi dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hal-hal yang menjadi penghambat dan juga peluang dimana kebijakan tersebut diusulkan agar dapat berguna dalam mengatasi suatu hal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah

bertujuan untuk memberikan manfaat dan mencapai tujuan yang baik bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah negara. Kebijakan publik sangat lah penting, karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya tujuan melalui tahapan yang perlu dipenuhi.

Pelaku kebijakan publik (*stakeholder*) menurut Dunn dalam (Tachjan, 2006) adalah yang terdiri dari pembuat, pelaksana, atau sasaran kebijakan. Pembuat dan pelaksana kebijakan terdiri dari orang, sekelompok orang atau sebuah organisasi yang memiliki peran dalam kebijakan yang dibuat, sebab mereka adalah yang mempengaruhi baik dalam perbuatan maupun dalam pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaannya. Sedangkan sasaran kebijakan adalah orang, sekelompok orang atau sebuah organisasi yang berada di tengah masyarakat yang memiliki kondisi tertentu baik dari perilaku maupun keadaannya sehingga ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat.

#### **1.2.1.1. Karakteristik Kebijakan**

Menurut Nugroho dalam (Pramaningsih, 2023) ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu :

- 1) Kebijakan publik adalah sesuatu yang untuk dipahami, karena makna yang terkandung adalah hal-hal yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan bersama.
- 2) Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yaitu sejauh mana perkembangan atau kemajuan dari cita-cita yang

sudah dijalankan.

### **1.2.1.2. Tahapan Kebijakan**

Menurut Dunn dalam (Fatmariyanti dan Fauzi 2023), dalam proses pembuatan kebijakan terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1) Tahap Perumusan Masalah

Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

2) Tahap *Forecasting* (Peramalan)

Memberikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

3) Tahap Rekomendasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

4) Tahap Monitoring Kebijakan

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai konsekuensi kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Kebijakan publik tidak hanya terdapat proses kebijakan publik yang dituangkan dan diimplementasikan, tetapi juga

menyangkut dampak yang ditimbulkan dalam sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda. Kebijakan publik juga harus berfokus pada kepentingan yang bersifat prioritas yang mengarah pada upaya menata kepentingan yang lebih luas.

### **1.2.2. Konsep Implementasi Kebijakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi berasal dari kata "*implementation*" yang berarti suatu pelaksanaan atau penyelenggaraan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai langkah perencanaan dan proses. Implementasi menurut Solichin Abdul Wahab dalam Oktaviani.J, (2018) bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pada tahapan ini pemerintah dan lembaga terkait menyusun rencana yang memuat tujuan, strategi, dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan (Dwi et al., 2024).

Syukur dalam Sumaryadi, (2005) mengemukakan ada tiga unsur-unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

- a) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan,
- b) Target *group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan,
- c) Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau

perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa implementasi adalah sarana untuk melaksanakan suatu kegiatan yang memberikan dampak atau manfaat yang dapat berupa undang-undang, keputusan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah atau instansi lainnya. Implementasi kebijakan adalah bagian penting dari keseluruhan proses suatu kebijakan. Menurut Charles O' Jones dalam Nurhaliza (2024) berpendapat tentang implementasi kebijakan, yaitu : *"implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect"* dimana implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang diarahkan agar menempatkan sebuah program untuk menimbulkan hasil. Pada dasarnya, implementasi kebijakan berfungsi untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang telah diterapkan di lapangan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat atau penerima kebijakan. Menurut Marilee S.Grindle, implementasi kebijakan adalah Langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memiliki dampak yang diharapkan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Riant dalam (Pramono, 2020) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, terdapat dua pilihan yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan yang menjadi turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah termasuk jenis kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas atau yang disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan yang dapat berupa undang-undang, keputusan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah atau instansi lainnya di lapangan.

#### **1.2.2.1. Model Implementasi kebijakan**

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami dengan menerapkan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Model tersebut akan memberikan gambaran mengenai situasi atau proses implementasi suatu kebijakan. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang juga digunakan dalam analisis kebijakan publik, antara lain model yang dikemukakan oleh Marilee S.Grindle dalam (Arnia Fajarwati, 2019) menyebutkan implementasi kebijakan berdasarkan oleh dua variabel, yaitu :

1. Isi Kebijakan, meliputi :
  - a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.  
Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi

kebijakan.

- b. Jenis manfaat yang dihasilkan. Pada poin ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat positif.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan. Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Isi kebijakan yang ingin dijelaskan haruslah memiliki skala yang jelas.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan. Kedudukan pembuat kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- e. Pelaksanaan program. Dalam menjalankan sebuah kebijakan harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten agar suatu kebijakan dapat berhasil.
- f. Sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan sebuah kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai agar dalam melaksanakan kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

## 2. Lingkungan Implementasi, meliputi :

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Hal ini diperlukan dalam sebuah kebijakan guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa. Lingkungan

dari suatu kebijakan sangat berpengaruh terhadap hasil atau keberhasilan sebuah kebijakan.

- c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana. Sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan dalam menanggapi sebuah kebijakan.

Adapun model implementasi kebijakan Charles O' Jones sebagai teori utama. Jones (1991), implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian yang diarahkan untuk melaksanakan sebuah program dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu :

1. Organisasi

*Organization* (organisasi) adalah aktivitas suatu organisasi dalam konteks implementasi kebijakan yang mencakup struktur organisasi, penataan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai implementor dan perlengkapan yang jelas. Struktur organisasi yang jelas sangat penting dalam pengimplementasian sebuah program. Struktur ini harus ditetapkan untuk memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan faktor yang sangat signifikan dalam menentukan kinerja sebuah organisasi.

2. Interpretasi

Interpretasi adalah proses menafsirkan sesuatu agar mudah dipahami. Jones (1991) interpretasi adalah menafsirkan agar sebuah kebijakan menjadi rencana

dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Maksudnya, interpretasi berfungsi untuk menafsirkan suatu kebijakan yang bersifat umum ke dalam langkah-langkah yang sistematis sehingga memudahkan dalam pengimplementasiannya sehingga dapat dipahami oleh para pelaksana atau implementor. Menurut Jones (1991) proses suatu kebijakan sangat bergantung pada komunikasi antara kata dan maknanya. Suatu kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada pelaksana kebijakan. Sehingga tidak adanya kebingungan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kegagalan atau tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

### 3. Penerapan atau Aplikasi

Jones (1991) mendefinisikan bahwa penerapan atau aplikasi sebagai ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program. Maksudnya, pada penerapan sebuah kebijakan melibatkan kegiatan rutin atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara berulang, baik dalam hal pembayaran, pelayanan, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dalam implementasi kebijakan dan memastikan bahwa tujuan dari kebijakan dapat dicapai.

#### **1.2.3. Konsep Lorong Wisata (Longwis)**

Kota Makassar memiliki sejumlah lorong baik pada bagian

barat – utara maupun pada bagian selatan – timur. Pemerintah Kota Makassar senantiasa membuat inovasi agar lorong-lorong Kota Makassar yang dulunya kumuh, gelap, gersang dan sering menjadi sumber penyakit sosial menjadi lorong yang bersih, asri, segar, sejuk, aman, nyaman, dan indah dipandang mata. Salah satu upaya pemerintah Kota Makassar ialah dengan pembentukan program Lorong Wisata (Longwis).

Lorong Wisata (Longwis) adalah salah satu program strategis Walikota Makassar yang diluncurkan pada 17 Agustus 2022 yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI dengan harapan dapat mengenalkan Kota Makassar pada dunia serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelaksanaan program ini tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 dimana program ini bertujuan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di Kota Makassar setelah pandemi COVID-19. Lorong Wisata (Longwis) adalah pengembangan atau tindak lanjut dari Lorong Garden (Longgar) yang merupakan kegiatan budidaya tanaman pangan secara menyeluruh oleh sekelompok masyarakat. Konsep inovasi pengembangan lorong secara konsisten dilakukan sejak tahun 2014 hingga berkembang ke berbagai inovasi hingga menjadi Lorong Wisata (Longwis) pada tahun 2022 dan menjadi program yang menggunakan konsep *Community Based Tourism* (CBT). *Community Based Tourism* (CBT) adalah konsep yang prinsip utamanya ialah menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dengan melakukan aktivitas pariwisata sebagai bentuk pemberdayaan (Majid & Salman, 2024). Berikut transformasi Lorong Wisata (Longwis) dari tahun 2014-2022.



**Gambar 2 1 Transformasi Lorong Wisata (Longwis)**

Sumber : Majid & Salman, 2024

Lorong Wisata (Longwis) ini didefinisikan sebagai Lorong yang dapat menjadi daerah kunjungan wisata yang memiliki infrastruktur yang baik, lingkungan asri, indah, bersih, hijau, dan menarik serta terdapat perputaran ekonomi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian warga tersebut. Dengan program Lorong Wisata (Longwis) dikembangkan dengan melakukan pembenahan lorong dan memanfaatkan lahan yang ada pada lorong untuk penanaman cabai, tomat, dan sayur-sayuran. Adapun tujuan program Lorong Wisata (Longwis) yang berdasar pada peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lorong Wisata, yaitu:

- 1) Melakukan pemetaan dan klasterisasi potensi lorong berbasis teknologi informasi, berdasarkan potensi lorong dalam penentuan Lorong Wisata yang terkait dengan potensi sumber daya manusia, potensi fisik lingkungan dan potensi pengembangan ekonomi.
- 2) Mengembangkan kegiatan ekonomi lorong yang berbasis *green garden*, kuliner dan kerajinan, dan
- 3) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mengembangkan ekonomi lorong berdasarkan potensi

yang dimiliki.

Lorong yang dijadikan sebagai Lorong Wisata (Longwis) adalah Lorong Wisata (Longwis) Kyoto yang terletak di jalan Dg. Narang. Lorong ini menjadi contoh awal akan program Lorong Wisata (Longwis) di Kota Makassar. Pada pelaksanaan Lorong Wisata (Longwis) harus melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini pemerintah Kota, kecamatan, kelurahan, serta masyarakat wilayah tersebut untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan keberhasilan Lorong Wisata. Sesuai visi misi Adama, ada 5.000 Lorong Wisata (Longwis) yang akan dibuat. Dibagi 1000 lorong tiap tahunnya, setiap lorong memiliki potensi yang berbeda. Karakteristik potensi yang dapat dikembangkan, seperti potensi sumber daya alam, potensi masyarakat, infrastruktur dan potensi lainnya. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar, ruang lingkup dalam pelaksanaan Lorong Wisata (Longwis) mencakup potensi lorong, penetapan Lorong Wisata, dan dewan lorong, pelaksanaan program, tugas dan peran, gugus dan tim teknis pembinaan dan pengawasan dan sumber pembiayaan. Dalam Lorong Wisata (Longwis) terdapat potensi-potensi yang ada, baik itu potensi budaya, kuliner, lahan dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di lorong. Lorong Wisata (Longwis) ditentukan oleh pihak kecamatan berdasarkan usulan yang diajukan oleh kelurahan melalui koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, dan RW setempat. Setelah pengajuan tersebut, verifikasi akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama tim ahli dari perangkat daerah dan/atau tim ahli Walikota Makassar sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Lorong Wisata.

Dalam pelaksanaan program Lorong Wisata (Longwis) terdapat yang disebut sebagai Dewan Lorong yang disingkat sebagai Delor. Dewan Lorong (Delor) adalah unsur masyarakat yang berdomisili di dalam Lorong yang ditetapkan oleh Camat dengan fungsi memberdayakan lorong di wilayahnya. Pembentukan Dewan Lorong ini merupakan langkah strategis dalam membangun kelembagaan masyarakat di tingkat lorong. Dewan Lorong (Delor) memiliki lima tugas dan tanggung jawab yakni menjadi mitra penyebarluasan informasi Lorong Wisata (Longwis) kepada masyarakat, melakukan pendampingan masyarakat, melakukan koordinasi dengan perangkat kelurahan dan kecamatan dalam pengembangan Lorong Wisata, melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan juga kecamatan serta *stakeholder* terkait dalam pengembangan Lorong Wisata, mengelolah dan juga menjaga aset pemerintah daerah yang ada pada Lorong Wisata, melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan Dewan Lorong Wisata. Dewan Lorong ini dibentuk oleh Camat yang jumlah anggota Dewan Lorong paling banyak 3 orang yang terdiri atas tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Jabatan Dewan Lorong akan berakhir apabila : masa jabatan berakhir (paling lama 3 tahun), meninggal dunia diberhentikan sewaktu-waktu.

Badan /lembaga pemerintah berperan memberikan dukungan dan pendampingan untuk optimalisasi program kerja Pembentukan Lorong Wisata (Longwis) sesuai mekanisme dan prosedur serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk pelaksanaan CSR agar berkontribusi kepada masyarakat, dan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat agar menitikberatkan CSR pada lingkungan Lorong Wisata (Longwis) binaan. Kedua untuk pelaksanaan tersebut dibawah koordinasi dan arahan forum CSR daerah.

Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah terdiri dari TP PKK, LPM, Karang Taruna, Kader Posyandu, RT dan RW. Mereka bertugas sebagai pendukung pelaksanaan program Lorong Wisata (Longwis) bersesuaian dengan program kelembagaan masing-masing dan program yang ada di Lorong Wisata. Selain itu, ada juga Organisasi Kemasyarakatan sebagai pendukung pelaksanaan Program Wisata terdiri dari DEKRANASDA dan Dharma Wanita yang memiliki tugas dan peran sesuai dengan program masing-masing dan berkesesuaian dengan program yang ada di Lorong Wisata. Untuk mendukung tugas keseluruhan di atas maka terbentuk Tim Teknis Lorong Wisata (Longwis) yang dapat dibentuk oleh masing-masing SKPD sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan tugas dan perannya masing-masing pada program Lorong Wisata. Selain itu, Gugus Tugas yang anggotanya berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Gugus tugas dan tim teknis ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Gugus Tugas Lorong Wisata (Longwis) bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Lorong Wisata, mengumpulkan data Lorong Wisata, Menyusun prioritas program untuk kegiatan Lorong Wisata, melakukan evaluasi, memonitor, pelaporan kebijakan pelaksanaan Lorong Wisata, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Tim Teknis Lorong Wisata (Longwis) bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Lorong Wisata (Longwis) dibentuk Sekretariat, Sekretariat ini bertugas untuk mengoordinir tiap SKPD, Kecamatan, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sekretariat Gugus Tugas Lorong Wisata (Longwis) berkedudukan di Dinas Pariwisata Kota Makassar. Setiap SKPD terlibat dalam pelaksanaan Pembentukan Lorong Wisata (Longwis) wajib melakukan pembinaan terhadap semua aktivitas/kegiatan terkait dengan Pembentukan Lorong Wisata.

Pembentukan Lorong Wisata (Longwis) ini memiliki pembiayaan yang berasal dari 3 macam sumber. Pertama, APBD yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD, CSR, dan sumber lainnya yang sah. Kedua, bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat. Ketiga, partisipasi dan swadaya masyarakat baik dari domisili Lorong yang akan dijadikan Lorong Wisata (Longwis) maupun masyarakat atau diluar domisili tersebut.

Lorong Wisata (Longwis) memiliki ciri khas yang berbeda dengan lorong-lorong lain di Kota Makassar. Ciri khas yang dimaksud adalah jalanan yang dipenuhi lampu jalan, adanya CCTV di beberapa Lorong Wisata (Longwis) untuk keamanan wilayah, terdapat lukisan-lukisan pada dinding bertulisan Lorong Wisata, terdapat papan informasi kepada pengunjung, dan ada gerbang selamat datang di depan lorong (Wulandari, 2024).

Melalui program Lorong Wisata (Longwis) diharapkan mampu menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu tempat wisatawan dengan beraneka ragam kuliner, budaya, tanaman, kerajinan-kerajinan tangan daur ulang dan potensi lainnya.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah utama yang hadir dalam penelitian ini ialah Implementasi Lorong Wisata (Longwis) menunjukkan adanya ketimpangan. Hal ini dapat dilihat adanya sebuah Lorong Wisata (Longwis) yang hingga saat ini masih berjalan dengan baik sesuai tujuannya dan terdapat juga Lorong Wisata (Longwis) yang belum berjalan efektif dan optimal secara keseluruhan dengan adanya berbagai dinamika. Maka, rumusan masalah ini akan dijawab menggunakan teori Charles O' Jones (1991) dengan menggunakan 3 indikator yaitu : organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan. Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana penerapan kebijakan Lorong Wisata (Longwis) Lavender dan Lorong Wisata (Longwis) Hajar Aswad di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan kebijakan Lorong Wisata (Longwis) Lavender dan Lorong Wisata (Longwis) Hajar Aswad di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis, praktis, dan metodologis.

### **1.5.1. Manfaat secara Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, akan memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman mengenai implementasi program Lorong Wisata (Longwis) Lavender dan Hajar Aswad di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini akan berkontribusi pada perkembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam kajian implementasi sebuah kebijakan.

### **1.5.2. Manfaat secara Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Makassar dalam menindaklanjuti dan mengevaluasi kebijakan yang telah dirumuskan terkait dengan Lorong Wisata (Longwis) selain itu, dengan temuan-temuan yang dihasilkan diharapkan dapat mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

### **1.5.3. Manfaat Secara Metodologis**

Diharapkan dalam penelitian ini, dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian ilmiah

lainnya yang memiliki fokus serupa, khususnya dalam hal implementasi kebijakan publik Lorong Wisata (Longwis) kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari objek, tanpa melibatkan eksperimen, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penelitian kualitatif bertujuan agar mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait dengan fenomena atau peristiwa dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang tidak berbentuk angka atau statistik.

Creswell (2012) dalam (Sugiyono, 2023) menyatakan bahwa studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap suatu atau lebih orang. Adapun strategi penelitian studi kasus digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber penelitian (observasi, dokumen, wawancara, dan sumber lainnya). Penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan Lorong Wisata (Longwis) di Kota Makassar.

#### **2.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Pada Lorong Wisata (Longwis) Hajar Aswad yang berlokasi di jalan Dr. Leimena Lorong 09, dan Lorong Wisata (Longwis) Lavender yang berlokasi di jalan Dr. Leimena Lorong 06.

## **2.3. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber informasi yang digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis berasal dari informan yang menjadi objek penelitian, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara langsung secara tatap muka. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat untuk menggambarkan hasil penelitian secara mendalam. Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling*, dimana peneliti memilih informan berdasarkan tujuan pengumpulan informasi yang diinginkan.

### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, dokumen tertulis, berita, dan aturan operasional lainnya. Data sekunder ini juga dapat diambil dari hasil penelitian sebelumnya, baik yang diakses secara *online* menggunakan fasilitas yang tersedia dan dokumentasi yang dilakukan melalui pengumpulan data langsung. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer (Sugiyono, 2023).

## 2.4. Informan Penelitian

Informan adalah anggota kelompok partisipan yang berfungsi sebagai pengarah dan penerjemah aspek budaya ataupun pelaku yang terlibat langsung dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini dipilih karena memiliki pengetahuan yang luas atau keterlibatan langsung dalam permasalahan tersebut. Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai ahli dan terlibat dalam proses tersebut. Proses penarikan sampel ini bersifat subjektif dengan tujuan tertentu, yang menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.

No	Kategori Informan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Staf Kelurahan Tello Baru	1	1	-
2.	Ketua RW 06	1	1	-
3.	Ketua RT 01	1	1	-
4.	Masyarakat Lorong Wisata (Longwis) Lavender	2	-	2

5.	Masyarakat Lorong Wisata (Longwis) Hajar Aswad	2	-	2
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

**Tabel 2 1 Informan Penelitian**

## **2.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Creswell, (2007) menyatakan bahwa penekanan studi kasus adalah pada kedalaman dan kerincian dari wawancara yang mendalam. Penggambaran dan pengungkapan kasus secara rinci. Oleh karena itu, pengumpulan datanya diambil dari berbagai sumber informasi untuk menghasilkan data yang kaya dalam membangun gambaran yang mendalam dari kasus yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan dengan mengamati objek atau fenomena secara langsung menggunakan indera manusia atau alat bantu. Teknik observasi sangat berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, dengan tujuan mengumpulkan data yang akurat. Beberapa hal yang perlu diamati meliputi kondisi tempat dimana kegiatan berlangsung, benda-benda, peralatan, serta perlengkapan dan penggunaannya di lokasi

penelitian. Selanjutnya, peneliti juga perlu memperhatikan para pelaku (termasuk status, jenis kelamin, usia, dan aspek lainnya), kegiatan yang berlangsung, tindakan, serta waktu kejadian.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan yang memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan narasumber atau informan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari partisipan. Melalui interaksi ini, peneliti dapat menggali secara mendalam dan memperoleh perspektif responden baik dari perwakilan pemerintah maupun perwakilan dari masyarakat lorong itu sendiri terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara akan tetapi dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian berupa foto-foto, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, buku-buku dan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber data berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian terdapat di pemerintah setempat atau pihak yang terlibat.

## **2.6. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan sebuah topik spesifik dalam suatu penelitian, fokus penelitian berfungsi sebagai pembatas ruang lingkup agar peneliti tidak terjebak dengan banyaknya data atau topik yang dapat meluas. Maka dari itu, agar dalam proses penelitian lebih terstruktur serta sistematis, maka ruang lingkup penelitian difokuskan pada bagaimana penerapan kebijakan Lorong Wisata (Longwis) di Kota Makassar dengan menggunakan indikator implementasi kebijakan Charles O' Jones. Jones (1991), implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian yang diarahkan untuk melaksanakan sebuah program dengan memperhatikan tiga aspek yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan/aplikasi.

### **1. Organisasi**

*Organization* (organisasi) adalah aktivitas suatu organisasi dalam konteks implementasi kebijakan yang mencakup struktur organisasi, penataan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai implementor dan perlengkapan yang jelas. Struktur organisasi yang jelas sangat penting dalam pengimplementasian sebuah program. Struktur ini harus ditetapkan untuk memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan faktor yang sangat signifikan dalam menentukan kinerja sebuah organisasi.

### **2. Interpretasi**

Interpretasi adalah proses menafsirkan sesuatu agar mudah dipahami. Jones (1991) interpretasi adalah menafsirkan

agar sebuah kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Maksudnya, interpretasi berfungsi untuk menafsirkan suatu kebijakan yang bersifat umum ke dalam langkah-langkah yang sistematis sehingga memudahkan dalam pengimplementasiannya sehingga dapat dipahami oleh para pelaksana atau implementor. Menurut Jones (1991) proses suatu kebijakan sangat bergantung pada komunikasi antara kata dan maknanya. Suatu kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada pelaksana kebijakan. Sehingga tidak adanya kebingungan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kegagalan atau tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

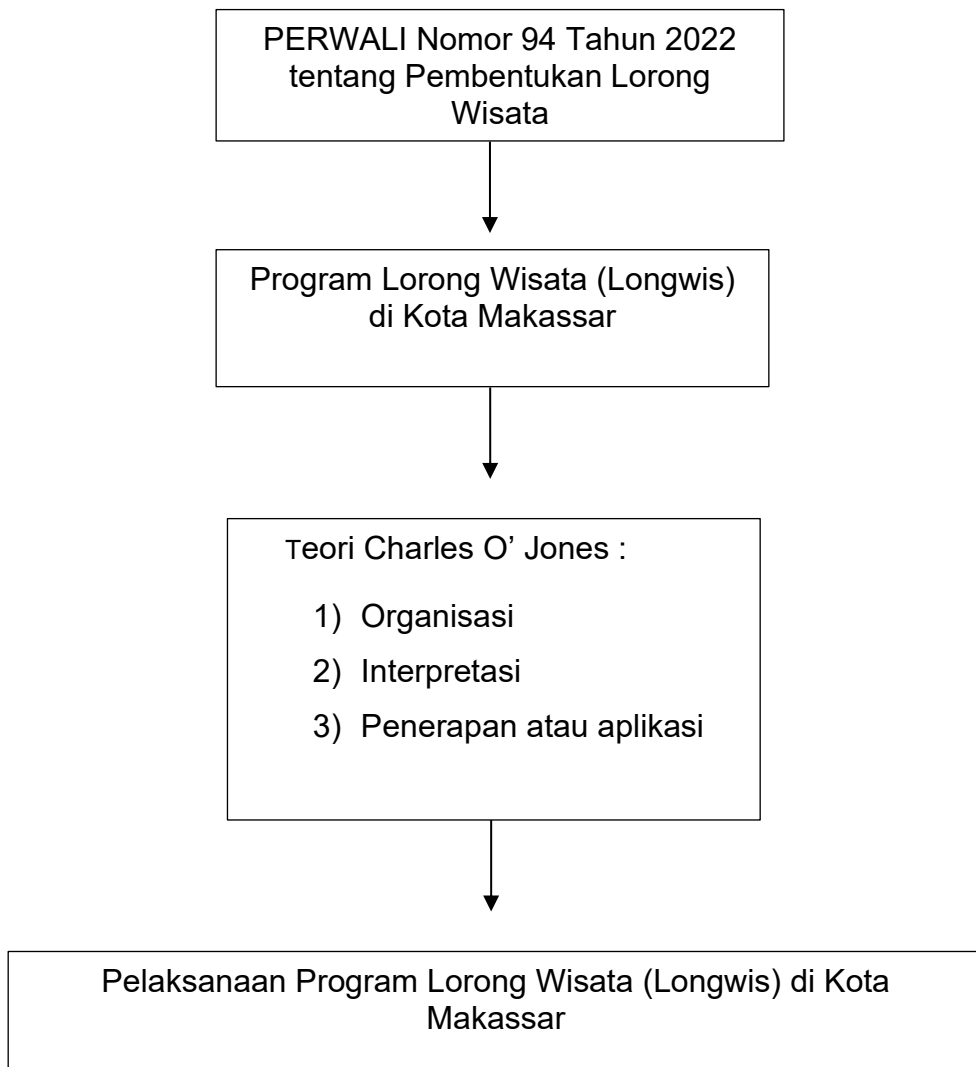
### **3. Penerapan atau Aplikasi**

Jones (1991) mendefinisikan bahwa penerapan atau aplikasi sebagai ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program. Maksudnya, pada penerapan sebuah kebijakan melibatkan kegiatan rutin atau kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara berulang, baik dalam hal pembayaran, pelayanan, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dalam implementasi kebijakan dan memastikan bahwa tujuan dari kebijakan dapat dicapai.

#### **2.7. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah alur penelitian yang kemudian dijadikan sebagai pola atau landasan dalam berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek penelitian. Dalam penelitian

ini, penulis mengambil lokasi di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, terkait dengan Implementasi Kebijakan program Lorong Wisata (Longwis), implementasi tersebut dapat diukur dengan melihat bagaimana proses dan bentuk evaluasi pada saat berjalannya program tersebut. Jika program tersebut tidak sesuai dengan harapan atau tujuan yang ingin dicapai, maka program tersebut belum dapat dikatakan efektif.



**Tabel 2 2 Kerangka Konseptual**

## 2.8. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam sebuah kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2023) . Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2023), mengemukakan bahwa terdapat beberapa teknik analisis data yang dapat dilakukan dalam penelitian, antara lain :

### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data).

Dalam penelitian kualitatif, Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah pengumpulan data. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti terhadap semua yang dilihat dan didengar. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya.

### 2. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dengan memfokuskan data yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, dan pemaknaan untuk menjawab pertanyaan riset.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data).

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

### 4. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan/Verifikasi).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Kesimpulan akhir dapat diambil apabila adanya konfirmasi atau bukti dari data-data yang diperoleh di lapangan.